



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 23 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumenep tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sumenep.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negera Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negera Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negera Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negera Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SUMENEP TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep.
2. Bupati adalah Bupati Sumenep.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep.
4. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah indikator utama dari Indikator Kinerja Daerah.
5. Indikator Kinerja Daerah yang selanjutnya disebut IKD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Organisasi Perangkat Daerah.

6. Kinerja Organisasi Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
7. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Penetapan IKU dan IKD adalah :

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan serta sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

IKU dan IKD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

IKU digunakan oleh Perangkat Daerah untuk :

- a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan.
- b. menyampaikan Rencana Kinerja dan Anggaran.
- c. menyusun Dokumen Penetapan Kinerja.
- d. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja.
- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sumenep Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati Sumenep ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Sumenep ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

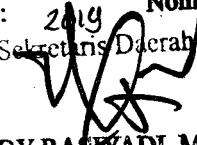
Ditetapkan di Sumenep
pada tanggal 25 MAR 2019

BUPATI SUMENEP



Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Sumenep
Tanggal: 25 MAR 2019
Tahun: 2019 Nomor: 24
Sekretaris Daerah



Ir. EDY RAHAYADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196508081990031014

Lampiran : Peraturan Bupati Sumenep
 Nomor : 23 Tahun 2019
 Tanggal : 25 Maret 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

VISI :

SUMENEP MAKIN SEJAHTERA DENGAN PEMERINTAHAN YANG MANDIRI, AGAMIS, NASIONALIS, TRANSPARAN, ADIL DAN PROFESIONAL

- MISI 1 : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PENGENTASAN KEMISKINAN
 TUJUAN 1.1. : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$$

Dimana:

- I Kesehatan = Angka Harapan Hidup (Umur panjang dan hidup sehat)
- I Pendidikan = Angka Harapan Lama Sekolah (Pengetahuan)
- I Pengeluaran = lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah (Standar hidup layak)

SASARAN KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB
1.1.1. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	1.1.1.1. Angka Rata-rata Lama Sekolah	$\frac{(\sum \text{Lama Pendidikan X Siswa setiap jenjang})}{\sum \text{Penduduk Usia Sekolah}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan

SASARAN KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB
	1.1.1.2. Angka Harapan Lama Sekolah	Merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. $AHLS_a^t = \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Dimana: $AHLS_a^t$ adalah harapan lama sekolah pada umur a di tahun t i = Usia ($a, a+1, \dots, n$) E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t P_i^t = Jumlah penduduk usia i pada tahun t	Dinas Pendidikan
1.1.2. Meningkatnya Minat Baca Masyarakat Utamanya Pelajar	1.1.2.1. Angka Harapan Hidup	Angka Harapan Hidup pada saat lahir (life expectancy at birth) ialah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.	Dinas Kesehatan
1.1.3. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	1.1.3.1. Angka Kemiskinan	Prosentase jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan dibagi dengan jumlah total penduduk $P_\alpha = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^\alpha$ Dimana: $\alpha = 0$ z = garis kemiskinan y_i = Rata-rata pengeluaran per kapitas bulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i = 1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$ Q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n = jumlah penduduk	Data BPS
	1.1.3.2. Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, dengan rumus sebagai berikut : $TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$	Dinas Tenaga Kerja

SASARAN KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB
	1.1.3.3. Penurunan Masalah Sosial	$\frac{\text{Jumlah masalah sosial}_{(t-1)} - \text{Jumlah masalah sosial}_{(t)}}{\text{Jumlah masalah sosial}_{(t-1)}} \times 100\%$ Dimana: t = tahun pengamatan (tahun ini) t-1 = satu tahun sebelumnya	Dinas Sosial

- MISI 2 : MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH KEPULAUAN DAN DARATAN YANG DIDUKUNG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM SERTA LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN
- TUJUAN 2.1. : Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur Dan Jaringan Transportasi Di Daratan Dan Wilayah Kepulauan Sebagai

INDIKATOR KINERJA UTAMA
Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Dipengaruhi oleh jumlah peningkatan kualitas infrastruktur dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pemukiman/perumahan secara memadai

SASARAN KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB
2.1.1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	2.1.1.1. Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik	$\frac{\sum \text{panjang jalan yang kondisinya baik, tahun berkenaan}}{\sum \text{panjang jalan, tahun berkenaan}} \times 100\%$	Dinas PU. Bina Marga
	2.1.1.2. Proporsi Jumlah jembatan dalam kondisi baik	$\frac{\sum \text{jembatan yang kondisi baik tahun berkenaan}}{\sum \text{panjang jembatan, tahun berkenaan}} \times 100\%$	Dinas PU. Bina Marga
	2.1.1.3. Indeks kinerja Irigasi	Jumlah aspek kondisi prasarana fisik + aspek sarana penunjang + aspek produktifitas tanah + aspek dokumentasi + aspek kondisi P3A yang dinyatakan dalam persentase	Dinas PU. Sumber Daya Air

SASARAN KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB
	2.1.1.4. Persentase aksesibilitas wilayah kepulauan dan daratan	$\frac{\% \text{ Ketersediaan prasarana transportasi} + \% \text{ kualitas pelayanan angkutan umum}}{2}$	Dinas Perhubungan
2.1.2. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pemukiman/ Perumahan Secara Memadai	2.1.2.1. Persentase rumah tinggal bersanitasi	$\frac{\sum \text{ rumah tinggal bersanitasi}}{\sum \text{ rumah tinggal}} \times 100\%$	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
	2.1.2.2. Persentase jumlah rumah tangga yang dapat megakses air bersih	$\frac{\sum \text{ rumah tangga yang dapat mengakses air bersih}}{\sum \text{ rumah tinggal}} \times 100\%$	
	2.1.2.3. Persentase penurunan luas area kumuh	$\frac{\sum \text{ luas area kumuh}_{(t-1)} - \text{luas area kumuh}_{(t1)}}{\text{luas area kumuh}_{(t-1)}} \times 100\%$	
	2.1.2.4. Rasio eletrifikasi	$\frac{\sum \text{ KK atau rumah yang mendapat pemenuhan energi listrik}}{\sum \text{ seluruh KK atau rumah se kab. Sumenep}} \times 100\%$	Dinas Pmberdayaan Masyarakat dan Desa

TUJUAN 2.2. : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

INDIKATOR KINERJA UTAMA
<p align="center">Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</p> <p align="center">IKLH Kabupaten = (30%) IPA + (30%) ISPU + (40%) ITH</p> <p>dimana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IKLH_Kabupaten = indeks kualitas lingkungan tingkat Kabupaten Sumenep 2. IPA = indeks pencemaran air sungai 3. ISPU = indeks standar pencemar udara 4. ITH = indeks tutupan hutan

SASARAN KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN / PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB
2.2.1. Meningkatnya Kelestarian Lingkungan	2.2.1.1. Indeks kualitas air sungai	$P_{ij} = \frac{\sqrt{(C_i/L_{ij})^2 M + (C_i/L_{ij})^2 R}}{2}$ <p>1. $(C_i/L_{ij})_M$ adalah nilai maksimum dari C_i/L_{ij} 2. $(C_i/L_{ij})_R$ adalah nilai rata-rata dari C_i/L_{ij} Evaluasi terhadap P_{ij} adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi baku mutu atau kondisi baik jika $0 \leq P_{ij} \leq 1,0$ - Tercemar ringan jika $1,0 < P_{ij} \leq 5,0$ - Tercemar sedang jika $5,0 < P_{ij} \leq 10,0$ - Tercemar berat jika $P_{ij} > 10,0$ 	Dinas Lingkungan Hidup
	2.2.1.2. Indeks kualitas udara	<p>1. Indeks Udara IKLH = $100 - [50/0.9 \times (I_{eu} - 0.1)]$ 2. I_{eu} = rata rata (SO₂ hasil pemantauan dibagi SO₂ Ref EU, dan NO₂ hasil pemantaun dibagi NO₂ Ref EU)</p>	Dinas Lingkungan Hidup
	2.2.1.3. Indeks Tutupan Lahan/Vegetasi	$ITV = 100 - (84,3 - (TV \times 100)) \times (50/54,3)$ $TV = \frac{LTV}{L \cdot W}$ <p>ITV = indeks Tutupan vegetasi/lahan TV = Tutupan Vegetasi LW = Luas Wilayah</p>	Dinas Lingkungan Hidup

MISI 3 : MENINGKATKAN KEMANDIRIAN PEREKONOMIAN PEDESAAAN DAN PERKOTAAN DENGAN MEMBERDAYAKAN POTENSI EKONOMI LOKAL YANG UNGGUL BERDAYA SAING TINGGI

TUJUAN 3.1. : Meningkatkan Perekonomian Daerah

INDIKATOR KINERJA UTAMA
<p>Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (non migas)</p> $G = \frac{(PNriil1 - PNriil0)}{PNriil0} \times 100\%$
<p>Dimana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. G = tingkat pertumbuhan ekonomi 2. PNriil1 = pendapatan kabupaten untuk tahun dimana tingkat pertumbuhan ekonominya dihitung. 3. PNriil0 = pendapatan kabupaten pada tahun berikutnya
<p>PDRB per kapita</p> $PDRB \text{ Perkapita}_t = \frac{PDRB_t}{Jumlah \text{ Penduduk}_t}$
<p>Dimana:</p> <p>PDRB per kapita menghitung membagi total PDRB dengan jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang digunakan untuk membagi adalah jumlah penduduk pada pertengahan tahun.</p> <p>Berdasarkan PDRB per Kapita dapat diketahui besarnya pendapatan yang dihasilkan oleh setiap penduduk di suatu daerah</p>

SASARAN KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB
3.1.1. Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan	3.1.1.1. Nilai tukar petani	$\frac{\text{Indeks yang diterima petani}}{\text{Indeks yang dibayar petani}} \times 100$	Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
	3.1.1.2. Nilai tukar nelayan	$\frac{\text{Indeks yang diterima nelayan}}{\text{Indeks yang dibayar nelayan}} \times 100$	Dinas Perikanan
3.1.2. Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan	3.1.2.1. Produksi tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura yang di panen per hektar (ton/ha)	Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
	3.1.2.2. Produksi Hasil Perkebunan	Jumlah Produksi Perkebunan yang dipanen per hektar (ton/ha)	Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan

SASARAN KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB
	3.1.2.3. Produksi Hasil Peternakan	Jumlah produksi komoditas peternakan dalam satu tahun (ton)	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	3.1.2.4. Produksi Hasil perikanan	Jumlah produksi komoditas perikanan tangkap dalam satu tahun (ton)	Dinas Perikanan
3.1.3. Meningkatnya Konsumsi Pangan dan Keragaman Pangan	3.1.3.1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	PPH = % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing - masing kelompok pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
3.1.4. Meningkatnya Daya Saing sektor Industri dan Perdagangan.	3.1.4.1. Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah	$\frac{\text{Jumlah IKM tahun } n - \text{jumlah IKM tahun } (n - 1)**}{\text{Jumlah IKM s/d tahun } n} \times 100\%$ <p>Dimana : IKM = Industri Kecil dan Menengah</p>	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	3.1.4.2. Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	Data Stastitik	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	3.1.4.3. Persentase pertumbuhan PDRB sektor perindustrian	Data Stastitik	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.1.5. Meningkatnya daya saing sektor Koperasi dan UMKM	3.1.5.1. Persentase Koperasi sehat (KSP/USP)	$\frac{\text{KSP/USP Koperasi Sehat}}{\text{KSP/USP Koperasi aktif}} \times 100\%$ <p>Berdasarkan PP No. 09/1995 tentang pelaksanaan kegiatan USP oleh Koperasi dan Permeneq No.19/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usp Oleh Koperasi</p>	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
	3.1.5.2. Persentase pertumbuhan UMKM	$= \frac{\Sigma \text{UMKM thn sekarang} - \text{Jml UMKM thn lalu}}{\Sigma \text{UMKM thn lalu}} \times 100\%$	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
3.1.6. Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata	3.1.6.1. Persentase kunjungan wisatawan	$= \frac{\Sigma \text{pengunjung tahun berkenaan} - \text{Jumlah pengunjung tahun sebelumnya}}{\Sigma \text{pengunjung tahun sebelumnya}} \times 100\%$	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan OR

SASARAN KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB
	3.1.6.2. Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	$= \frac{\text{PAD dari sektor pariwisata}}{\text{Total PAD}} \times 100\%$	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
3.1.7. Meningkatnya Daya Tarik Investor	3.1.7.1. Jumlah investor	Jumlah investor tahun berkenaan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	3.1.7.2. Jumlah nilai investor	Jumlah nilai investor tahun berkenaan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
3.1.8. Meningkatnya Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah	3.1.8.1. Persentase PAD terhadap APBD (PD)	$\frac{\text{Total PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

MISI 4 : MENINGKATKAN KULTUR DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL
TUJUAN 4.1. : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Akuntabel

INDIKATOR KINERJA UTAMA
<p>Nilai Survey Kepuasan Masyarakat</p> $SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$ <p>Dimana :</p> $\text{Nilai penimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} \times \frac{1}{9} = 0,11$

SASARAN KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB
4.2.1. Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja	4.2.1.1. Nilai SAKIP	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten	Sekretariat Drh
	4.2.1.2. Opini BPK	Hasil Opini BPK	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	4.2.1.3. Peringkat LPPD	Nilai Peringkat Laporan Pertanggung jawaban Pemerintah Daerah (LPPD)	Sekretariat Drh
4.2.2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah	4.2.2.1. Nilai SKM unit-unit layanan publik	:	
	Nilai SKM Layanan KTP, KK, Akte Kelahiran/Kematian	Nilai (hasil survei) terhadap tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintahan di bidang layanan KTP, KK, Akte Kelahiran/Kematian	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Nilai SKM Layanan Bidang Kominfo	Nilai (hasil survei) terhadap tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Nilai SKM Layanan Perpustakaan	Nilai (hasil survei) terhadap tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintahan di bidang Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	Nilai SKM Layanan Kecamatan	Nilai (hasil survei) terhadap tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan
	Nilai SKM Layanan Sekretariat Dewan	Nilai (hasil survey) terhadap tingkat kepuasan masyarakat yang dilakukan untuk mengetahui kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD, khususnya dari kalangan DPRD. Ada 2 unit layanan Sekretariat DPRD yang menjadi fokus survey yakni Bagian Hukum dan Perundang-undangan dan Bagian Rapat dan Risalah.	Sekretariat DPRD
	Nilai SKM Layanan BKPSDM	Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat sesuai Permenpan & RB Nomor 18 Tahun 2014	Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM

SASARAN KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB
	Nilai SKM Layanan Diklat	Nilai (hasil survei) terhadap tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintahan di bidang Diklat	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
	Nilai SKM Layanan Litbang	Nilai (hasil survei) terhadap tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintahan di bidang Litbang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Nilai SKM Layanan BPPD	Nilai (hasil survei) terhadap tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah	BPPD
	Nilai SKM Layanan RSUD	Nilai (hasil survei) terhadap tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan RSUD Dr. H. Moh. Anwar	RSUD Dr. H. Moh. Anwar
	4.2.2.2. E- Government	Nilai indeks sistem pemerintahan yang berbasis elektronik	Dinas Komunikasi dan Informatika

MISI 5 : MENINGKATKAN TATA KELOLA KEHIDUPAN MASYARAKAT AMAN DAN KONDUSIF MELALUI PARTISIPASI MASYARAKAT SERTA STAKEHOLDER DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN

TUJUAN 5.1. : Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Desa

INDIKATOR KINERJA UTAMA
Indeks Desa Membangun
Jumlah persentase BUMDes yang sehat + (Jumlah desa mandiri dan desa tertinggal)

SASARAN KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB
5.1.1. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Aspek Ketahanan Lingkungan (ekologi), Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Sosial	5.1.1.1. Persentase BUMDes yang Sehat	$\frac{\text{Jumlah BUMDes sehat}}{\text{Jumlah seluruh BUMDes}} \times 100\%$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	5.1.1.2. Persentase Desa Mandiri	$\frac{\text{Jumlah Desa Mandiri}}{\text{Jumlah seluruh Desa}} \times 100\%$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	5.1.1.3. Persentase Desa Tertinggal	$\frac{\text{Jumlah Desa Tertinggal}}{\text{Jumlah seluruh Desa}} \times 100\%$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

TUJUAN 5.2. : Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Perlindungan Masyarakat

INDIKATOR KINERJA UTAMA
<p style="text-align: center;">Indeks Keamanan</p> <p>Jumlah penduduk / (% penyelesaian pelanggaran keamanan dan ketertiban masyarakat + % penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak)</p>

SASARAN KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB
5.2.1. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	5.2.1.1. Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS)	$\frac{\text{Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang di selesaikan}}{\text{Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang dilaporkan}} \times 100\%$	Satpol PP

SASARAN KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB
5.2.2. Meningkatnya Kesetaraan Gender Serta Perlindungan Perempuan dan Anak	5.2.2.1. Indeks Pemberdayaan Gender	IDJ menunjukkan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDJ mencakup variabel keterwakilan perempuan di parlemen, tenaga profesional perempuan, dan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
	5.2.2.2. Nilai/Peningkatan Kabupaten Layak Anak	Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB

- MISI 6** : MENINGKATKAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN DAN BUDAYA SERTA NASIONALISME YANG DIDUKUNG KEARIFAN LOKAL DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT
- TUJUAN 6.1.** : Meningkatkan Kerukunan Antar Umat Beragama Yang Dilandasi Dengan Semangat Nasionalisme Dan Kearifan Lokal

INDIKATOR KINERJA UTAMA
Indeks Toleransi
Dipengaruhi oleh penyelesaian konflik sosial dan indeks pelestarian seni budaya

SASARAN KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB
2.1.1. Meningkatnya Toleransi dan Komunikasi Antar Umat Beragama	2.1.1.1. Persentase Penyelesaian Konflik Sosial	$\frac{\text{Jumlah konflik sosial yang di selesaikan tahun berkenaan}}{\text{Jumlah konflik sosia tahun berkenaan}} \times 100\%$	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

SASARAN KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB
2.1.2. Meningkatnya Pelestarian Nila-nilai Seni dan Budaya	2.1.2.1. Indeks Pelestarian Seni dan Budaya	Dihitung dengan pembobotan unsur : <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah even kesenian/budaya skala kabupaten/provinsi/nasional dibanding total jumlah even budaya yang ada, dengan bobot 30% - Persentase kelompok kesenian yang aktif dibanding total kelompok kesenian yang ada, dengan bobot 25% - Jumlah Pelestarian budaya yang dilaksanakan dibanding jumlah budaya yang ada, dengan bobot 20% - Jumlah cagar budaya yang terpelihara dibanding total cagar budaya yang terdata, dengan bobot 15% - Jumlah desa wisata yang dibina dibanding jumlah desa budaya yang ada, dengan bobot 10% 	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga

BUPATI SUMENEP



Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si